

**KEBIJAKAN RUMAH LAYAK HUNI
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENGATASI KEMISKINAN TAHUN 2016**

Muhammad Irfan
Email : @gmail.com
Pembimbing : Drs. H. Isril, M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order to achieve the vision and mission of Pekanbaru City and poverty alleviation of Pekanbaru city government since 2012 has determined the program of Rumah Diak Huni. That is a program that helps the provision of housing needs for poor families and in realizing the national program of a million homes. In addition, as an effort to accelerate and equitable development for the welfare of the community. The research problem can be formulated as follows: "How is the Housing Policy Eligible Pekanbaru City Residents in Overcoming Poverty in 2016?" The purpose of this study are: "To Know House Decent Policy Huni Pekanbaru Municipal Government in Overcoming Poverty in 2016 ". Qualitative research methods. This research was conducted in Pekanbaru City. Primary data sources through interviews as well as secondary data sources. Data analysis technique is conducted by qualitative descriptive analysis The variables of Van Meter and Van Horn are described in the following research results: Basic measures and policy objectives, helping Pekanbaru City residents have a habitable home that accelerates the community to achieve welfare. Policy sources, Pekanbaru Municipality government is not Have sufficient funds available to meet the entire society that meet the criteria for a decent home, human resources available in the home program have good qualifications ranging from the level of education, experience, and kepangkatan.Komunikasi between organizations and implementation activities, There is no problem of inter-organizational communication. Characteristics of implementing agencies, the characteristics are adjusted to the applicable regulations. The economic, social and political conditions of the political conditions of the legislative election and presidential election in 2014 have little or no effect on the home program Habitation implemented by the government of Pekanbaru City, the economic problem is the limited Budget Acceptance and Expenditure (APBD) owned by the government of Pekanbaru City. The tendency of implementors, executors to run as desired, this is known from the lack of protest about the implementation of the house habitable program, the mechanisms ranging from proposal to development

carried out in accordance with the rules, and no problems experienced by the contractor implementing the development.

Keywords: Policy, habitable home

A. Latar Belakang

Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki domain pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan Nasional. Hal ini pun terjadi di daerah, khususnya di kota Pekanbaru yang pemerintah kotanya memiliki langkah tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan melalui semangat kebijakan lokal daerahnya. sejak tahun 2004 pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kemauan yang baik terhadap isu kemiskinan di daerahnya. Langkah ini terwujud melalui Peraturan Mendagri No 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota yang isinya memuat program prioritas dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan warga miskin di Kota Pekanbaru.

Guna pencapaian visi dan misi Kota Pekanbaru serta penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2012 telah menetapkan program Rumah Layak Huni. Yaitu program yang membantu penyediaan kebutuhan rumah bagi keluarga

kurang mampu serta dalam mewujudkan program nasional sejuta rumah. Selain itu juga sebagai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru telah membangun sebanyak 1.000 buah rumah layak huni yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan adapun sumber dana pembangunan rumah layak huni berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru. (<http://utusanriau.co/>)

Berdasarkan uraian fenomena yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016”

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002 : 101). Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain

merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Metter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditetapkan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2002 : 101-102).

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-

indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Budi Winarno, 2002 : 110).

Namun demikian, dalam banyak kasus kita menemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk menjawab mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. *Kedua*, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang disertai tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain atau sistem pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 110-111).

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan

sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 111).

2. Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang(*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif (Budi Winarno, 2002 : 112).

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam

meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut (Budi Winarno, 2002 : 112-113).

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkhis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personal yang diukur dari : 1) rekrutmen dan seleksi, 2) penugasan dan relokasi, 3) kenaikan pangkat dan 4) akhirnya pemecatan. Disamping itu, mereka mempunyai kontrol atas alokasi

anggaran belanja pada biro-biro pemerintah dan kantor-kantor daerah yang dapat mereka tingkatkan atau kurangi. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Selain juga, para pejabat-pejabat ini mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan (Budi Winarno, 2002 : 113).

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. *Kedua*, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif (Budi Winarno, 2002 : 113).

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan

menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka (Budi Winarno, 2002 : 116).

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu (Budi Winarno, 2002 : 117).

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu (Budi Winarno, 2002 : 117-118).

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam

kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 118).

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi (Budi Winarno, 2002 : 118).

Akhirnya, seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan-bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan

pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam (Budi Winarno, 2002 : 118-119).

C. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian (Sugiyono, 2009 : 285). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009 : 2). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2009 : 7-8).

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan data. Pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Hal ini berarti, selama proses penelitian seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai saat pengumpulan data, tahap penulisan data dan penyajian data.

D. Hasil Penelitian

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Tujuan dari diadakannya program rumah layak huni adalah

pemerintah Kota Pekanbaru membantu masyarakat Kota Pekanbaru untuk mempunyai rumah layak huni sehingga mempercepat masyarakat untuk meraih kesejahteraan.

Persyaratan untuk mendapat rumah layak huni dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah memiliki KTP Kota Pekanbaru serta memiliki sebidang tanah. Selanjutnya aparatur dari tingkat RT sampai dengan camat mengusulkan masyarakat tersebut untuk mendapat program rumah layak huni.

2. Sumber-sumber kebijakan

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mempunyai ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi keseluruhan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapat rumah layak huni. Namun pemerintah Kota Pekanbaru pelan-pelan akan berusaha untuk memenuhi keinginan masyarakat memiliki rumah layak huni.

Sumberdaya manusia yang ada dalam program rumah layak huni memiliki kualifikasi yang baik mulai dari tingkat pendidikan, pengalaman, maupun kepengkatan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Tidak ada permasalahan mengenai komunikasi antar organisasi

komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru terhadap sasaran program rumah layak huni melalui aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sasaran merasa jelas dan memahami tentang siapa saja yang menjadi sasaran program, apa yang menjadi syarat program,

dan bagaimana prosedur pengajuan program.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk dalam pembagian tugas masing-masing bagian yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Bahwasannya kondisi politik yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014 sedikit banyaknya berpengaruh terhadap program rumah layak huni yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, selain itu program rumah layak huni juga dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selain masalah politik, masalah ekonomi yaitu keterbatasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap tidak semua penduduk Kota Pekanbaru yang memenuhi persyaratan langsung menjadi peserta dari program rumah layak huni dari pemerintah Kota Pekanbaru.

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pelaksana dari program rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru berjalan sebagaimana yang diinginkan, hal ini diketahui dari tidak adanya protes mengenai pelaksanaan program rumah layak huni, mekanisme mulai dari pengusulan sampai dengan pembangunan dijalankan sesuai dengan aturan, serta tidak ada permasalahan yang

dialami oleh kontraktor pelaksana dalam pembangunan.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian “**Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016**” adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan yang dijumpai meskipun indikator-indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sudah terlaksana.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan program rumah layak huni pemerintah Kota Pekanbaru adalah :
 - a. Keterbatasan dana
 - b. Sasaran program rumah layak huni.

F. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian “**Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016**” adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperbanyak alokasi anggaran dalam kebijakan rumah layak huni sehingga lebih banyak rumah tangga yang mendapat bantuan.
2. Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai siapa sasaran dari program rumah layak huni.

G. Daftar Pustaka

Buku teks

- Azizy, A Qodri. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabet
- Miriam, Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Parsons. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta:Kencana
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Tjandra, W Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Pembaruan
- Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Medpress

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Mendagri No 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber lain

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>
- <https://riau.bps.go.id/lin>
- <http://www.pekanbaru.go.id/>
- <http://utusanriau.co/>